



Gelar Sosialisasi Pendidikan Pemilih, KPU Jabar Ajak Generasi Muda dan Pengurus Pitaloka Cerdas Berpolitik

SUMEDANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyelenggarakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 Bersama Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jabar di Kiarapayung, Kabupaten Sumedang, Kamis (19/9/2024).



Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 Bersama Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jabar di Kiarapayung, Kabupaten Sumedang, Kamis (19/9/2024).

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia mengatakan, acara sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan para pemilih pemula memahami adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.

“Pada tanggal 27 November 2024 bagi warga Jawa Barat yang telah berusia 17 tahun, maka bisa datang ke TPS untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta memilih bupati dan wakil bupati juga memilih wali kota dan wakil wali kota,” ucap Hedi.

“Jadi nanti 27 November akan memilih dua, memilih bupati atau wakil bupati serta memilih gubernur dan wakil gubernur,” tambahnya.

Bukan hanya di Jabar, kata Hedi, pemilihan calon kepala daerah ini juga diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia.

“Itulah yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah serentak dan itu tidak hanya di Jawa Barat tapi semua provinsi akan melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak,” ungkapnya.

Menurutnya, sebagai generasi muda yang tumbuh menjadi warga negara yang aktif, maka sudah seharusnya anak muda melek politik dan belajar tentang demokrasi.

“Pemuda itu adalah masa depan dunia dan politik. Oleh karena itu kita harus mewarnainya. Karena dunia itulah yang akan kita warisi,” ujarnya.

Hedi mengatakan bahwa generasi

mudalah yang nantinya akan menentukan tongkat estafet kepemimpinan yang akan datang.

“Kalau kita tidak peduli dengan politik maka kita perlu khawatir akan masa depan dan daerah kita masing-masing,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Hedi pun mengajak generasi muda untuk mengenal lebih dalam tentang calon pemimpinnya.

“Untuk pemilihan yang lebih maksimal dan tidak salah dalam memilih pemimpin, maka pelajari dulu siapa calonnya, apa programnya, apa visi-misinya sebelum datang ke TPS,” ucapnya.

“Salah satunya adalah bisa mem-follow akun Instagram KPU Provinsi Jabar, di situ temen-temen bisa mendapatkan informasi banyak hal tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan kita laksanakan pada tanggal 27 November mendatang,” sambungnya.

Menurutnya, wajib bagi generasi muda mempelajari profil, rekam jejak hingga visi-misi dan program kerja calon kepala daerah.

“Sebelum masuk ke TPS, wajib temen-temen sudah mempelajari profil, visi-misi, membaca program kerja masing-masing calon gubernur dan wakilnya atau juga calon bupati dan wakilnya serta wali kota dan wakilnya,” katanya.

Dengan begitu, lanjut Hedi, generasi muda akan dapat lebih bijak dalam memilih calon kepala daerahnya.

“Apakah program kerjanya itu menguntungkan kita sebagai rakyat atau tidak, kemudian programnya itu realistis atau tidak, itu bisa dilihat salah satunya dengan melihat akun Instagram KPU Provinsi Jabar,” terangnya.

Hedi mengatakan, salah satu bentuk

partisipasi nyata generasi muda dalam menyukseskan Pilkada 2024 ini adalah dengan menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Temen-temen yang sudah berusia 17 tahun bisa mendaftar sebagai anggota KPPS. Nah itu salah satu bentuk partisipasi politik konkret temen-temen dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024,” katanya.

Hedi pun mengajak generasi muda untuk bersama-sama menciptakan Pilkada 2024 yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (luber jurdil).

“Karena itu perlu keterlibatan temen-temen semua. Salah satunya dengan ikut mengawal agar tidak ada lagi tim sukses atau pasangan calon yang kampanye menggunakan isu SARA,” katanya.

Selain itu juga kita harus cegah terjadinya kampanye menggunakan politik identitas seperti menggunakan isu agama. Yang paling berbahaya itu adalah tidak boleh menggunakan politik uang karena itu bisa merusak demokrasi kita,” kata Hedi.

Sebelumnya, Hedi Ardia hadir dalam Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Tahun 2024 bersama Pitaloka di Sekretariat Pitaloka, Jalan Braga, Kota Bandung, Kamis (19/9/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Hedi mengajak para pengurus Pitaloka untuk menjadi pemilih yang rasional.

“Mudah-mudahan ibu-ibu atau pengurus dari Pitaloka milih gubernur, bupati atau wali kota tuh tidak sebatas karena faktor yang sulit parameternya. Misalkan, ‘ah saya mah milih ini karena ga ada lagi yang lain, ga tau yang lainnya mah,’” ucap Hedi.

Hedi juga meminta, untuk mempertimbangkan setiap visi-misi dan program unggulan dari setiap pasangan calon kepala daerah.

“Pertimbangkan milih A itu karena programnya bagus, kemudian dimungkinkan program ini dilaksanakan. ‘Program ini bagus nih, belum ada di pasangan calon’, tapi mampu ga APBD? Jangan-jangan memang itu hanya janji-janji saja, realisasinya mah kan, gimana lagi apalagi udah terpilih mah kan ga bisa dibatalin, emang ada pembatalan pasangan calon yang tidak memenuhi janji kampanye? Ga ada,” tuturnya.

Oleh karena itu, Hedi pun mengajak masyarakat khususnya para pengurus Pitaloka untuk menjadi pemilih yang kritis dan

cerdas.

“Makanya ibu-ibu sok dari sekarang yang belum follow akun IG KPU Provinsi Jawa Barat, silakan difollow. Di sana ada semua informasi tentang visi-misi seluruh bakal calon, kita pelajari,” katanya.

“Kenapa calon ini kaya gini? Masuk akal yang mana? Saya mah setuju ke ini, mau ngajak yang lain? Silakan, itu bagian dari strategi,” lanjutnya.

Hedi pun mempersilahkan masyarakat untuk mengajak warga lainnya memilih calon pasangan kepala daerah yang diyakininya akan mampu memimpin dengan baik. Asalkan, ajakan tersebut tidak dibarengi dengan politik uang.

“Hal yang tidak boleh adalah ngajakin terus kitanya sambil bagi-bagi amplop, itu bu yang merusak teh, itu yang merusak demokrasi kita teh,” ujarnya.

Mau sampai kapan juga, kalau kita semuanya yang di sini pengurus Pitaloka gagah nih sosialisasinya. Tapi setelah beres (sosialisasi), ‘mana tim sukses teh? Kenapa belum ada yang nitipin amplop?’, ah percuma bu,” katanya.

Menurutnya, bangsa Indonesia tidak akan maju jika pola pikir masyarakatnya masih dengan cara-cara konvensional.

“Mau ngomongin kemana juga, kalau kita pola pikirnya masih kaya gitu ga akan maju bu, asli. Mau sampai kapan bangsa kita cara berpolitiknya masih pola-pola konvensional seperti itu,” imbuhnya.

Hedi juga mengingatkan, untuk tidak terbuai dengan janji-janji manis para calon kepala daerah. Sebab menurutnya, calon yang dipilih nanti akan menentukan nasib masyarakat dan daerahnya dalam 5 tahun kedepan.

“Kalau misalkan ibu-ibu sekarang pilih gubernur, bupati dan wali kota cukup diselesaikan Rp200.000, cukup diselesaikan dengan Rp50.000, ibu-ibu semuanya tidak berhak menagih janji apapun. Kenapa? Karena sudah dibeli. Kata calon terpilih, ‘kan udah sama saya kemarin bayar, ibu-ibu tidak perlu menuntut apapun, selesai urusan kita,’” bebrnya.

Oleh karena itu, Hedi pun mengajak untuk menjadi pemilih yang bijak dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 27 November 2024 mendatang dan tolak politik uang.

“Jangan lupa, 27 November datang ke TPS, kita gunakan hak pilih kita dan tolak politik uang. Karena yang paling berbahaya di samping isu politisasi agama itu adalah politik uang, bahaya pisan,” pungkasnya.